

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang terjadi mau tidak mau memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik. Kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM.

Hal ini semakin disulitkan dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada seluruh aktivitas ekonomi yang mengakibatkan tidak jalannya kegiatan produktif dan memaksa banyak perusahaan untuk melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada karyawan-karyawannya sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah pendapatan masyarakat serta melemahnya daya beli masyarakat.

Dalam sektor Pertanian khususnya dalam usahatani, pandemi COVID-19 ini berdampak pada perputaran modal dan laba dari usahatani tersebut. Hal ini membuat para pelaku usahatani harus memutar otak dalam memenuhi kelangsungan usahanya, salah satunya dengan kredit di koperasi.

Di sisi lain, pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran hutang atau kredit yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja keuangan. Banyak kreditur yang sudah meminta kelonggaran batas dan besaran pembayaran cicilan hutang dan kredit. Ditambah dengan ketidakjelasan kapan pandemi COVID-19 akan berakhir menjadikan lembaga keuangan mulai memikirkan cara agar perusahaan tetap berjalan. Fenomena tersebut secara tidak langsung akan dampak kepada kinerja sektor Perekonomian, salah satunya Lembaga Keuangan Syariah seperti Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wattamwil (BMT).

Menurut (Nawawi, 2009: 50) perbankan syariah adalah lembaga investasi dan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sumber dana yang didapatkan harus sesuai dengan syariah, alokasi investasi yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat, dan jasa-jasa perbankan yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), namun demikian dua jenis lembaga tersebut belum mampu menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Maal Wattamwil (BMT). Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tergolong cepat dan salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat Muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam (Sudarsono, 2003: 23-24).

Baitul Maal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit, seperti; infaq, zakat, dan shadaqah. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berlandaskan syariah. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat (Sudarsono, 2003: 84).

Keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia. Hingga saat ini sudah ada ribuan BMT bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi.

BMT dikelompokkan oleh Dinas Koperasi Kota Padang ke dalam kelompok Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wattamwil (BMT). KSPPS-BMT yang aktif di Kota Padang 2020 sebanyak 108 unit dengan total anggota seluruh KSPPS-BMT 19.630 anggota (Lampiran 1)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wattamwil (BMT) didirikan dengan tujuan mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang terdapat di kelurahan-kelurahan Kota Padang melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kelurahan yang pelaksanaannya bekerjasama dengan BRI Syariah Pusat, Mandiri Syariah dan PINBUK Pusat. Kerjasama KSPPS-BMT dengan BRI Syariah dan Mandiri Syariah Pusat adalah penyimpanan dana KSPPS-BMT, peminjaman dana, pemberian pelatihan kepada pengelola KSPPS-BMT, sedangkan kerjasama dengan PINBUK Pusat adalah pemberian pelatihan kepada pengelola KSPPS-BMT dan juga pemberian software aplikasi pada sistem komputer di setiap KSPPS-BMT (KSPPS-BMT Koto Lalang, 2015).

Dalam operasionalnya, berjalan baik atau tidaknya BMT dapat dilihat dari kinerja keuangan BMT itu sendiri. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh BMT.

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi suatu lembaga keuangan, analisis keuangan memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang sering dipakai adalah analisis rasio keuangan, yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya. Analisis rasio keuangan merupakan metode analisis yang sering dipakai karena merupakan metode yang paling cepat untuk mengetahui kinerja keuangan BMT. Dengan mengetahui kinerjanya, BMT akan dapat melakukan perkiraan keputusan apa yang akan diambil guna mencapai tujuannya. Analisis rasio keuangan pada BMT akan menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antar pos-pos tertentu dengan pos-pos lainnya. Dalam hal ini analisis rasio keuangan pada BMT akan menggali informasi dari laporan neraca dan laporan hasil usahanya.

Namun tidak dapat dipungkiri selama masa pandemi COVID-19 dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia akan berdampak pada kinerja KSPPS-BMT, salah satunya berkurangnya kemampuan nasabah/anggota mengembalikan kredit karena tidak jalannya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis kinerja keuangan untuk mengetahui kondisi KSPPS-BMT selama pandemi COVID-19 yang sesungguhnya, apakah dalam keadaan sehat, kurang sehat atau mungkin tidak sehat. Secara sederhana bahwa KSPPS-BMT dapat dikatakan dalam keadaan sehat apabila KSPPS-BMT dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. KSPPS-BMT yang sehat adalah KSPPS-BMT yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi layaknya bank formal dan dapat menjadi alternatif sumber kredit bagi masyarakat. KSPPS-BMT yang dapat menjalankan fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kota Padang tersebar di masing-masing kelurahan dan telah berdiri sejak tahun 2010. KSPPS-BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Padang. Saat ini KSPPS-BMT di Kota Padang terdapat 108 buah lembaga yang terdiri dari 88 KSPPS-BMT yang berbadan hukum (Lampiran 2). KSPPS-BMT adalah lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan modal dan peminjaman dana, maka dari itu persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan pun sangat mudah diakses bagi masyarakat, karena tanpa agunan dan hanya butuh surat rekomendasi dari RT/RW yang berlandaskan dengan sistem kepercayaan dan kejujuran yang ditanamkan kepada seluruh anggota.

Adapun latar belakang KSPPS-BMT berdiri, yaitu atas tersedianya suatu wadah koordinasi dan integrasi dengan berbadan hukum. Disamping itu, dengan tersedianya lembaga keuangan yang mudah di akses oleh masyarakat dari kelompok berpenghasilan rendah, agar dengan pinjaman tersebut bisa

mengembangkan dan meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Keberadaan KSPPS-BMT ini juga menekan keberadaan rentenir di tengah-tengah masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan ekonomi syariah dan juga termasuk program Pemerintah Kota Padang dalam menekan angka kemiskinan.

Kecamatan Lubuk Kilangan terdapat tujuh KSPPS-BMT, yaitu KSPPS-BMT Kelurahan Koto Lalang, KSPPS-BMT Kelurahan Bandar Buat, KSPPS-BMT Kelurahan Padang Besi, KSPPS-BMT Kelurahan Indarung, KSPPS-BMT Kelurahan Batu Gadang, KSPPS-BMT Kelurahan Tarantang, KSPPS-BMT Kelurahan Baringin. Kelurahan Koto Lalang berada ditengah-tengah kawasan industri dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian wirausaha baik dalam sektor Agribisnis, UMKM ataupun Industri Rumah Tangga.

KSPPS-BMT Koto Lalang mulai berdiri 11 Juli 2012 lalu. Dengan modal awal Rp. 35.000.000,00. Dana itu berasal transformasi dana KMK (Kredit Mikro Kelurahan) yang diserahkan kepada KSPPS-BMT dengan ditambah dana pendiri yang terkumpul pada saat itu . KSPPS-BMT Koto Lalang mulai beroperasi sejak tahun Januari 2013. Perputaran dana KSPPS-BMT ini sejak 2013 telah berkembang pesat dengan jumlah dana per- Juli 2021 sebesar Rp. 232.259.457,00 dengan jumlah keseluruhan anggota 210 orang, 159 orang terbagi kedalam 18 kelompok dan 51 orang secara Individu (Lampiran 3).

KSPPS-BMT Koto Lalang dinobatkan sebagai KSPPS-BMT terbaik se-Kota Padang pada tahun 2018 (Lampiran 4). Indikator yang termasuk menjadi penilaian KSPPS-BMT terbaik yaitu dinilai dari total asset, perkembangan jumlah pembiayaan, jumlah anggota, dan rendahnya tingkat kemacetan pengembalian dana. KSPPS-BMT Koto Lalang mempunyai asset yang meningkat setiap tahun. Perkembangan jumlah pembiayaan disertai meningkatnya jumlah anggota yang cukup pesat, serta jumlah tunggakan yang menurun setiap tahun. Maka dari itu KSPPS-BMT Koto Lalang layak menjadi KSPPS-BMT terbaik.

Pada awal berdiri KSPPS-BMT Koto Lalang menyalurkan dana kepada nasabah melalui kelompok-kelompok yang beranggotakan 5-10 orang atau yang dinamakan dengan sistem tanggung renteng. Tanggung Renteng yaitu sistem pemberian dana pembiayaan secara berkelompok dengan kesepakatan jika ada anggota yang menunggak dalam pengembalian dana maka anggota kelompok

yang lain wajib membayar angsurannya. Penerapan sistem tanggung renteng adalah strategi dari KSPPS-BMT Koto Lalang dalam meningkatkan pengembalian dana pembiayaan anggota, dan terbukti bahwa jumlah tunggakan anggota menurun setiap tahun. Prosedur pengembalian angsuran pembiayaan ini setiap minggu dengan sistem jemput ke ketua kelompok atau bisa juga mendatangi kantor KSPPS-BMT. KSPPS-BMT Koto Lalang menerapkan tertib administrasi, seperti pelaporan tiap minggunya oleh pengurus dan anggota supaya mengetahui perkembangan aset setiap harinya. Namun semenjak beberapa tahun terakhir sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 sistem ini terus memiliki kendala, khususnya dalam pengembalian dana pinjaman dan kredit. Kendalanya kerap kali terjadi pada ketua kelompok yang memakai uang anggota yang sudah terkumpul untuk keperluan pribadinya dahulu ketimbang membayar angsuran kredit, sehingga terjadinya kredit macet. Oleh karena itu, pada Januari 2020 saat pandemi COVID-19, KSPPS Koto Lalang mengubah sistem itu dengan menyalurkan dana hanya secara Individu yang bersangkutan untuk meminimalisir adanya kredit macet.

Kredit macet pada KSPPS Koto Lalang akan mempengaruhi nilai *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti. Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan, semakin tinggi rasio ini semakin buruk kualitas pembiayaan (Mutamimah, 2012).

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia SE BI 6/23/DPNP/2011 mengenai sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa tingkat persentase NPF dapat dilihat pada Tabel 1.

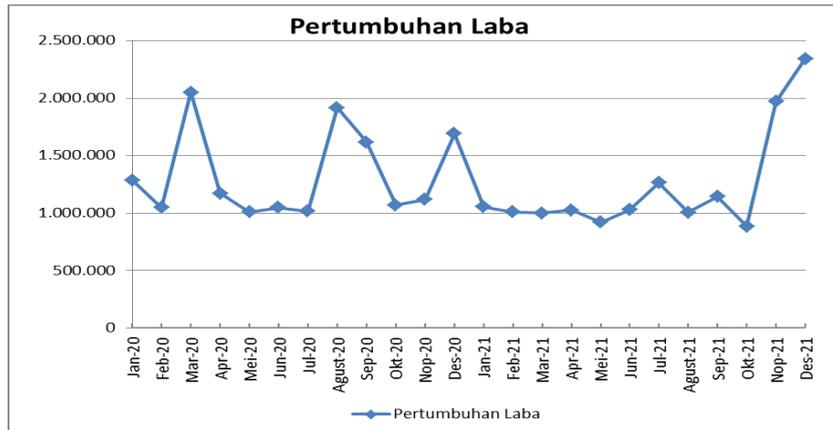
Tabel 1. Kriteria Penilaian Peringkat NPF

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Peringkat 1 : $NPF < 2\%$ | Sangat Sehat |
| Peringkat 2 : $2\% \leq NPF < 5\%$ | Sehat |
| Peringkat 3 : $5\% \leq NPF < 8\%$ | Cukup Sehat |
| Peringkat 4 : $8\% \leq NPF < 12\%$ | Kurang Sehat |
| Peringkat 5 : $NPF \geq 12\%$ | Tidak Sehat |

Berdasarkan kriteria penilaian peringkat NPF diatas, terlihat pada tahun 2019 angka NPF yang dimiliki KSPPS-BMT Koto Lalang sebesar 15,13% dengan kriteria tidak sehat, pada tahun 2020 sebesar 9,79% dengan kriteria kurang sehat dan pada tahun 2021 sebesar 5,66% dengan kriteria cukup sehat. Untuk perkembangan NPF perbulan, angka NPF tahun 2019 dan 2020 tingkat *Non Performing Financing* (NPF) KSPPS Koto Lalang cenderung tidak sehat, namun pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan menuju kriteria sehat- (Lampiran 6).

Terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai bulan Desember 2021, merupakan periode perhitungan kinerja keuangan KSPPS-BMT Koto Lalang pada masa pandemi COVID-19, semenjak KSPPS-BMT mengubah sistem tanggung renteng yang terus mengalami kendala dan KSPPS-BMT merupakan salah satu lembaga yang menerima dampak akibat bencana tersebut, KSPPS-BMT Koto Lalang tetap membuat Laporan Keuangan dan Laporan Neraca untuk menyampaikan pertanggung jawaban kegiatan yang dilakukan dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2021.

Dilihat pada sisi laporan keuangan KSPPS-BMT Koto Lalang dari Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 (Lampiran 8) terlihat persentase Pertumbuhan Laba yang berfluktuasi pada KSPPS-BMT Koto Lalang. Pada bulan Januari 2020 memperoleh Laba sebesar Rp. 1.286.000,-, pada bulan Februari 2020 turun sebesar 18,41%, pada bulan Maret 2020 naik secara drastis sebesar 95,48% pada bulan April kembali turun sebesar 42,9% dan pada bulan Mei pertumbuhan laba kembali turun sebesar 13,93%. Kemudian pada bulan Juni naik sebesar 3,99% dan pada bulan Juli kembali turun sebesar 3,03%. Pertumbuhan Laba yang berfluktuatif ini disebabkan oleh berfluktuatif nya Jumlah Pendapatan dan juga Jumlah Beban yang dibayarkan oleh KSPPS-BMT Koto Lalang setiap bulannya.



Gambar 1. Pertumbuhan Laba KSPPS Koto Lalang Periode Januari 2020-Desember 2021

Persentase perkembangan modal juga berfluktuasi pada KSPPS BMT Koto Lalang (Lampiran 9). Pada bulan Januari tahun 2020 KSPPS-BMT ini memiliki modal sebesar Rp. 173.539.814,- pada bulan Februari 2020 naik sebesar 1,39%, pada bulan Maret 2020 kembali naik sebesar 1,24%, pada bulan April kembali naik sebesar 0,81% dan pada bulan Mei pertumbuhan modal naik sebesar 0,82%. Kemudian pada bulan Juni 2020 naik sebesar 1,36%. Modal KSPPS-BMT Koto Lalang didapat dari Total Aktiva dikurang dengan Hutang Lancar. Pertumbuhan Modal yang meningkat setiap bulannya berasal dari Total Aktiva yaitu Aktiva Lancar dan Aktiva Tetap yang terus meningkat signifikan setiap bulannya. Begitu sebaliknya tidak diikuti dengan meningkatnya secara signifikan Hutang Lancar bahkan pada tahun 2019 adanya hutang ke pihak ke-3, sehingga diperoleh Perkembangan Modal yang terus meningkat setiap bulannya.



Gambar 2. Perkembangan Modal KSPPS Koto Lalang Periode Januari 2020-Desember 2021

Persentase pertumbuhan modal yang naik turun setiap bulannya pada bulan-bulan tersebut belum bisa memberikan gambaran keadaan kinerja keuangan pada KSPPS-BMT Koto Lalang selama masa pandemi COVID-19, karena modal merupakan salah satu prinsip dalam pengukuran perkreditan yang sehat selain prinsip karakter, kapasitas, jaminan, kondisi perekonomian serta kendala.

Disisi lain, keberadaan KSPPS-BMT Koto Lalang sangat aktif di tengah masyarakat Kelurahan Koto Lalang dan sekitarnya, Terlebih lagi dimasa pandemi COVID-19 ini lembaga keuangan yang menawarkan kemudahan akses di perkirakan akan mengalami pertumbuhan jumlah nasabah setiap bulannya. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi nasabah aktif dan pasif yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 Terdapat 126 orang nasabah aktif dan 55 orang nasabah pasif, terjadi peningkatan pada tahun 2019 terdapat 130 orang nasabah aktif dan 65 orang nasabah pasif, pada tahun 2020 juga terjadi peningkatan yaitu sebanyak 134 orang nasabah aktif dan 69 orang nasabah pasif dan pada tahun 2021 juga terjadi peningkatan yaitu sebanyak 140 orang nasabah aktif dan 73 orang nasabah pasif (Lampiran 5). Dapat dilihat perkembangan nasabah KSPPS-BMT Koto Lalang mengalami peningkatan nasabah aktif dan diikuti juga peningkatan nasabah pasif. Sehingga peran dari lembaga keuangan ini cukup sentral dalam hal membantu kemudahan permodalan kegiatan perekonomian. Namun tidak dapat dipungkiri akan berdampak pada kinerja KSPPS-BMT, salah satunya berkurangnya kemampuan nasabah/anggota mengembalikan kredit/kredit macet karena tidak jalannya aktivitas ekonomi.

Dengan melakukan analisis kinerja keuangan maka dapat diketahui apakah proses yang terjadi didalam aktivitas KSPPS-BMT sudah dapat menempatkan KSPPS-BMT Koto Lalang menjadi lembaga keuangan yang mampu menyalurkan bantuan modal kepada masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Dimasa-masa sulit inilah KSPPS-BMT Koto Lalang diharapkan dapat memainkan perannya untuk membantu masyarakat dari segi permodalan dan membantu program pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah serta Usahatani pada masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas, timbul beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana manajemen KSPPS-BMT Koto Lalang pada saat pandemi COVID-19 dan sebelum masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan KSPPS-BMT Koto Lalang pada saat pandemi COVID-19 dengan sebelum masa pandemi COVID-19?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wattamwil (BMT) Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang”**.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan manajemen KSPPS-BMT Koto Lalang pada saat pandemi COVID-19 dan sebelum masa pandemi COVID-19.
2. Menganalisis perbandingan kinerja keuangan KSPPS-BMT Koto Lalang pada saat pandemi COVID-19 dengan sebelum masa pandemi COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat yang berguna :

1. Bagi KSPPS-BMT, yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk KSPPS-BMT Koto Lalang dan referensi bagi KSPPS-BMT yang lain dalam menjalankan operasional, khususnya selama masa sulit akibat pandemi COVID-19.
2. Bagi Dunia Akademis, yaitu dapat menambah atau memperkaya ilmu dan informasi mengenai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khususnya Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wattamwil (BMT).
3. Bagi mahasiswa, yaitu sebagai bahan bacaan dan referensi ilmu pengetahuan tentang Lembaga Keuangan khususnya KSPPS-BMT serta bahan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan.